

BAB V PENUTUP

Sengketa Laut China Selatan merupakan masalah yang hingga saat ini belum juga terselesaikan. Sengketa tersebut terjadi karena tumpang tindih klaim antara negara-negara yang bersengketa. Negara-negara yang mengklaim wilayah Laut China Selatan antara lain adalah China, Filipina, Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Taiwan. Tumpang tindih klaim di wilayah Laut China Selatan membuat negara-negara yang bersengketa sering menghadapi permasalahan yang melibatkan kekuatan militer masing-masing negara. Hal tersebut mereka lakukan untuk mempertahankan dan memperjuangkan klaim negara mereka atas wilayah Laut China Selatan. Tentu saja, permasalahan ini dapat memperkeruh serta mengganggu stabilitas kawasan, terkadang permasalahan sengketa ini mengakibatkan terganggunya kepentingan negara-negara yang berlokasi di sekitar kawasan Laut China Selatan.

Negara-negara yang bersengketa di Laut China Selatan saling memperebutkan wilayah tersebut karena menyimpan sumber daya alam baik hayati dan non-hayati yang sangat melimpah yang berada di pulau-pulau, perairan, dan dasar lautan. SDA non-hayati seperti mineral, gas dan minyak mentah sangat melimpah di wilayah perairan Laut China Selatan. Berdasarkan dari data Kementerian Geologi dan Sumber Daya Mineral Republik China, di perairan tersebut memiliki potensi minyak hingga 213 miliar barel dan kandungan gas alam diperkirakan sebanyak 2 quadrillion kubik per kaki. Laut China selatan juga memiliki sumber gas hidrokarbon yang belum dieksplorasi.

Selain sumber daya minyak dan gas yang sangat melimpah, kawasan perairan yang sangat luas ini juga menyimpan sumber daya ikan yang sangat besar. Menurut *World Wildlife Fund, Resource Scarcity in the South China Sea* pada 2015, perairan ini berhasil menyumbang kebutuhan ikan sebesar 10% secara global. Sektor perikanan merupakan penghasilan utama Asia Tenggara dengan produksi tahunan mencapai 22,5 juta ton pada 2016 dan diprediksikan akan terus mengalami peningkatan sebesar 36,9 juta ton pada 2030 dan 51,5 juta ton pada 2050.

Selain sumber daya alam hayati dan non-hayati yang sangat melimpah, Laut China Selatan juga merupakan jalur pelayaran yang sangat strategis. Secara geografis Laut China Selatan berada di antara dua samudera yaitu Pasifik dan Hindia, serta dua benua yaitu Asia dan Australia. Kawasan ini merupakan jalur pelayaran kapal-kapal internasional dan perdagangan lintas laut serta menghubungkan tiga jalur perdagangan yaitu, Eropa, Amerika, dan Asia. Berbagai komoditas, seperti minyak bumi dan gas alam berlalu-lalang di kawasan ini. *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* memperkirakan bahwa sepertiga perdagangan maritim global melalui perairan ini. Banyaknya potensi strategis yang dimiliki kawasan perairan ini membuat para negara-negara yang bersengketa berusaha untuk tetap mempertahankan klaimnya.

Melihat konflik sengketa Laut China Selatan yang semakin memanas, Xi Jinping mengatakan bahwa China akan berusaha meredam kasus sengketa wilayah maritimnya menggunakan jalan damai sesuai dengan pembangunan *Peaceful Rise China*, tanpa menggunakan kekuatan militer agar menjaga

perdamaian dan stabilitas kawasan, tetapi China akan tetap mempertahankan klaimnya atas Laut China Selatan sebagai upaya melindungi hak dan kepentingan inti nasional China. Filipina merupakan negara yang berhasil China ajak untuk menjalin kerja sama bilateral.

Pada masa kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte terdapat suatu perubahan besar dimana Filipina menjadi lebih terbuka dan mau bekerja sama dengan China. Duterte memiliki beberapa kepentingan yang ingin ia capai, yaitu ingin melindungi keamanan dan kesatuan wilayah serta kepentingan nasional Filipina. Meskipun sengketa masih terjadi, China dan Filipina mengesampingkan permasalahan tersebut dan mulai melakukan kerja sama bilateral. Duterte lebih memilih jalan damai untuk menyelesaikan sengketa dengan China karena tidak ingin menghadapi konflik yang lebih besar lagi, bahkan Duterte mengurangi kerja sama dengan Amerika Serikat.

Pada saat Duterte menjabat sebagai presiden Filipina terdapat perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Filipina, Duterte mengatakan akan berintegrasi lebih dekat dengan China. Duterte memutuskan untuk mengesampingkan isu arbitrase internasional yang berhasil di menangkan oleh Filipina. China dan Filipina sepakat memperbaiki hubungan mereka yang sempat memanas karena adanya arbitrase tersebut. Sebagai upaya menjalankan pembangunan Peaceful Rise yang berusaha menjalin kerja sama menggunakan jalan-jalan damai. China dan Filipina menjalankan *Bilateral Consultative Mechanism (BCM)* sebagai hasil dari meningkatnya hubungan baik antara China dan Filipina. BCM dibentuk untuk bertukar pandang tentang masalah yang sedang terjadi oleh kedua belah pihak

negara. Kedua negara sepakat untuk melanjutkan diskusi tentang langkah-langkah membangun kepercayaan untuk meningkatkan rasa saling percaya dan menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan di Laut china selatan yang dapat meningkatkan perselisihan yang mengganggu perdamaian serta stabilitas kawasan.

Pertemuan BCM dilakukan sebanyak enam kali, berjalannya *bilateral consultative mechanism* antara China dan Filipina mendapat kecaman dari dunia internasional maupun domestik, serta diduga masih ada tindakan-tindakan sepihak tetapi tidak memunculkan eskalasi konflik yang lebih besar terhadap kedua negara. China dan Filipina juga benar-benar berupaya menjalankan cara-cara damai meskipun mendapatkan kecaman. Kedua negara dapat melaksanakan berbagai kerja sama yang direncanakan seperti pengelolaan perikanan bersama, penelitian ilmiah kelautan, perlindungan lingkungan laut, pengembangan minyak dan gas, serta operasi pencarian dan penyelamatan bersama.

Pada saat menjalankan pertemuan BCM yang ketiga pada China dan Filipina memutuskan untuk menjalin *joint development*. *Joint development* merupakan salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk negara-negara yang sedang berada dalam sengketa. *Joint development* merupakan salah satu langkah yang dilakukan China untuk meredam sengketa Laut China Selatan. Salah satu negara yang Tiongkok ajak untuk melakukan *joint development* adalah Filipina. China dan Filipina setuju untuk melakukan *joint development* untuk melakukan eksplorasi minyak bersama.

Pada saat kunjungan Presiden Xi Jinping ke Manila pada November 2018, Filipina dan China berhasil menandatangani *Memorandum of Understanding on*

Oil and Gas Development Cooperation. Ada beberapa faktor yang membuat Duterte ingin melakukan *joint development* dengan China, yaitu untuk menghindari konflik bersenjata maupun tidak bersenjata, untuk meredakan ketegangan geopolitik regional, serta untuk melakukan diplomasi preventif dan ekonomi. Hingga saat ini MoU yang berhasil di tandatangani pada tahun 2018 oleh China dan Filipina masih dalam peninjauan ulang. Pada 15 Oktober 2020, Duterte mengumumkan pencabutan moratorium eksplorasi minyak dan gas alam di Reed Bank, dimana sebelumnya ia memberlakukan pelarangan eksplorasi energi di daerah Reed Bank. Pencabutan moratorium tersebut di sambut baik oleh China dan kedua negara telah membentuk mekanisme kerja sama. *PXP Energy Corp* Filipina sedang bernegosiasi dengan CNOOC untuk pengembangan minyak bersama.

Dalam mengambil sebuah kebijakan setiap negara pasti memiliki faktor-faktor pendukung yang menjadi penguat mereka. Menurut John P. Lovel dalam merumuskan suatu kebijakan, suatu negara pasti memiliki beberapa faktor yang membuat mereka memilih kebijakan tersebut, yaitu struktur sistem internasional, persepsi elit, strategi negara-bangsa lain, dan kapabilitas negara. Pertama adalah sistem internasional, China dan Filipina terjebak di dalam sengketa Laut China Selatan yang menghantarkan mereka untuk mengambil keputusan. Kedua adalah persepsi elit, Xi Jinping dan Duterte memiliki pandangan yang sama mengenai potensi di Laut China Selatan akan sangat menguntungkan jika dapat di eksplorasi bersama. Ketiga adalah strategi negara-bangsa lain, China dan Filipina sepakat melakukan kerja sama bilateral dan juga memilih jalan damai dalam mengecilkan

eskalasi konflik di Laut China Selatan. Keempat adalah kapabilitas negara, Duterte berintegrasi lebih dekat dengan China karena menyadari besarnya kapabilitas yang dimiliki oleh bangsa China dan akan memberikan keuntungan bagi Filipina. Berdasarkan dari keempat faktor di atas, dapat ditentukan pola interaksi yang terjadi di antara China dan Filipina, yaitu leadership strategy dimana suatu negara memiliki posisi mengontrol negara lain melalui persuasi atau tawar menawar.